

Selamat & Sukses
MILAD KE-34
IPHI
(IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA)
"Haji Mabruk Sepanjang Hayat
untuk Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan"

22 MARET 2024

**PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN**

**SELAMAT DAN SUKSES
MILAD KE-34
IPHI**

DRS. H. A. HAFIDH ASROM, MM
KETUA PW IPHI DIY

**AL AZHAR YOGYAKARTA
WORLD SCHOOLS**

Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM
Pendiri Sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta
Anggota DPD / DPRD - RI DIY

**BANK BPD DIY
syariah**

"Nyelengi saka saiki,
kanggo munggah kaji.
Ayo bukak Tabungan Haji Muda!"

Syaratnya mudah!

- Setoran awal Rp10.000,-
- Daftar haji bisa dilakukan sejak usia 12 tahun dengan saldo minimal Rp25 juta

1500061

IPHI
Selamat & Sukses
**HARLAH KE-34
IPHI**

DR. (HC) dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG. (K)
Ketua PD IPHI Kulon Progo

IPHI
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
Haji Sepanjang Hayat
KABUPATEN SLEMAN

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I
Ketua PD. IPHI Sleman

Drs. H. Sukirman, MA
Sekretaris PD. IPHI Sleman

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Xedaulatan Rakyat
Suara Hati Nurani Rakyat

Dikabulkan

tokoh masyarakat. Mereka menyampaikan pada kami tentang cerita-cerita proses pemilu yang terjadi di Indonesia tentang beberapa masalah," ujar Ganjar di kawasan Gondangdia Jakarta.

la mengatakan cerita-cerita itu dikomparasi dengan relawan dan partai pendukung di lapangan. Menurutnya, hasilnya juga relatif sama. "Banyak catatan disampaikan ke kami, cerita tentang aparat yang terlibat mulai pusat sampai daerah, cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali di mana menurut riset ada korelasi antara bantuan itu dengan pengaruh pemilih. Belum lagi cerita *money politics* dan cerita intimidasi," jelasnya.

Ganjar sudah menyampaikan hal tersebut ke KPU dan Bawaslu. Namun, tak semua laporan direspon. "Maka setelah pengumuman KPU, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Maka benteng terakhirnya adalah MK," tegas Ganjar.

Pihaknya sudah menyiapkan tim hukum

untuk segera mendaftarkan gugatan hasil pemilu ini ke MK. la menyatakan gugatan akan dilayangkan hari ini atau besok. "Ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim nanti yang ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MKMK, penyelenggara pemilu ada hukuman etik, maka kita mesti mengembalikan titik demokrasi kita ini jauh lebih baik," ucapnya.

Ganjar juga berharap gugatan ini akan membuka tabir proses Pemilu 2024. "Tentu saja harapan kita MK yang nanti akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita agar sesuai harapan dan akurat," tandasnya.

Sementara itu, Mahfud MD menambahkan, gugatan yang dilakukan ke MK bukan untuk mencari kemenangan. Lebih dari itu, gugatan dilakukan untuk masa depan demokrasi Indonesia. "Hal yang harus diungkap dalam teater hukum yang bernama MK. Ini demi masa depan demokrasi, bukan kami sendiri. Kami ingin mewariskan pada generasi yang akan datang agar jangan terja-

di perusakan terhadap demokrasi dan hukum," ungkap Mahfud. TPN Ganjar-Mahfud telah membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan yang dipimpin Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.

Pada bagian lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres akan diumumkan 22 April 2024. Tanggal tersebut telah tercantum dalam Peraturan MK No 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pilpres.

la memastikan tanggal-tanggal proses penanganan perkara PHPU Pilpres masih sesuai dengan jadwal walaupun akan terpotong libur Hari Raya Idul Fitri. Proses perkara PHPU Pilpres adalah 14 hari dimulai sejak pengajuan permohonan.

Apabila ada dua kubu yang mengajukan permohonan, kata Fajar, terdapat kemungkinan persidangan keduanya digelar di tanggal yang sama, sehingga MK memiliki dua skenario yang akan diterapkan. (Ant/Obi)-f

Masa

pertama pada bulan November 2024 untuk 276 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, kemudian gelombang kedua pada bulan Desember 2025 untuk 270 kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020, dinilai oleh hakim tidak beralasan secara hukum.

"Permohonan berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan berubahnya jadwal pemungutan suara

serentak secara nasional adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Selain itu, lanjutnya, dalil yang diajukan para pemohon mengenai Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pengisian kekosongan jabatan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. "Menurut Mahkamah, dalil para pemohon mengenai Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah tidak relevan untuk

Harga

April potensi panen padi mencapai 103.493 ton dan Mei 201.876 ton. Sementara potensi produksi padi dari panen itu di bulan April mencapai 65.407 ton dan Mei 127.586 ton.

Mundurinya panen raya padi di DIY, dikarenakan dampak El Nino akhir tahun lalu.

"Sejumlah tantangan membuat potensi panen raya padi di DIY menu-

dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak beralasan menurut hukum," ujarnya.

Sementara itu, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekih terhadap putusan MK tersebut. "Saya berpendapat bahwa Mahkamah semestinya melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap sidang pleno untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat," ucapnya. (Ant/Has)-f

Politik

ekonomi ataupun sosiologis seperti pertimbangan program kerja partai politik maupun kandidat dan seterusnya. Kini, perilaku pemilih di Indonesia cenderung berperilaku atas dasar faktor psikologis (figur politisi).

Kajian Santoso, et.al (2014) mengungkapkan tentang tren politik figur yang menggeser terhadap peran partai politik untuk menjalankan fungsinya memobilisasi massa atau pemilih dalam pemilu. Pergeseran ini turut dibaca Mujani dan Liddle (2007; 2010) yang menekankan, perilaku memilih di Indonesia cenderung bersifat psikologis. Sehingga mendorong terhadap kelahiran politik figur. Pengalaman Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pilpres 2009 menunjukkan tentang perilaku pemilih yang cenderung dipengaruhi oleh figur politisi (Hapsari, 2010).

Jika situasi politik figur terus-menerus terbangun, lantas risiko apa sajakah yang muncul? Setidaknya ada dua indikasi risiko yang dapat kita lihat dari fenomena ini. Pertama, ketidakpercayaan partai politik semakin tinggi. Belajar dari sejarah bangsa, partai politik menjadi kekuatan penekan

yang dapat menjadi jembatan warga negara dengan pemerintah serta mengubah lanskap perpolitikan bangsa. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya tren politik figur di Pemilu 2024, partai politik mengalami krisis eksistensi di mata publik.

Kedua, kompetisi yang tidak seimbang di antara kandidat. Kecenderungan terhadap politik figur membuat adanya keleluasaan bagi kandidat yang memiliki modal sosial, politik dan ekonomi untuk berkreasikan. Contoh konkret dalam Pemilu 2024. Status Gibran sebagai putra Presiden Jokowi berpengaruh terhadap kemenangan dalam Pemilu 2024. Aktivasi modal sosial, politik dan ekonomi dapat kita lihat.

Dalam konteks ini, situasi ekritis dialami partai politik. Semakin politik figur berkembang, maka semakin partai politik tidak berdaya. Salah satu contoh penting yang dapat kita lihat adalah fenomena naiknya Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara instan. Modal sosial, ekonomi dan politik sebagai putra Presiden Jokowi dianggap PSI sebagai kekuatan

run. Seperti luas lahan yang terus menurun setiap tahunnya, serta dampak El Nino yang mengakibatkan masa tanam dan panen jadi mundur," terangnya. (Ria)-f

Sambungan hal 1

membawa kejayaan bagi PSI. Alhasil, kita dapat melihat kepada eketidakberdayaan partai politik untuk menjaga koridor fungsi partai politik (kaderisasi politik) ketika terdapat kesempatan untuk menggaet kekuatan figur individu yang memiliki modal (sosial, ekonomi dan politik) yang kuat.

Marwah partai politik harus dikembalikan sebagai lembaga *intermediary* maupun lembaga yang tumbuh dan berkembang dengan publik. Tahun 1998 kita merasakan reformasi politik dengan ditandai transisi menuju demokrasi. Namun sayangnya, reformasi partai politik tidak turut terjadi di masa tersebut. Situasi yang terjadi justru partai politik ehanya berganti kostum. Dengan kata lain, reformasi partai politik harus didorong dengan memperbaiki setiap level sistem baik dari rekrutmen hingga pendidikan kader. Meskipun penerapan reformasi partai politik sangatlah sulit, namun optimisme harus dijaga dalam melahirkan wajah partai politik yang 'baru'. (Penulis adalah Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Head of Research Departemen PARES Indonesia)-d



KR-Antara/Nova Wahyudi

DITANGKAP DI SUMSEL: Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa berinisial NW (tengah) masuk ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sumsel, Rabu (20/3/2024). Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap NW yang merupakan oknum PNS di BPN Yogyakarta terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan berupa asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo, Yogyakarta, dan mengakibatkan kerugian negara Rp 10 miliar.

Kemenag

berharap peran anggota MCH yang sebagian diisi para wartawan dari berbagai media dapat memerankan fungsi edukasi. Dengan begitu, para jemaah dapat tercerahkan dan terhindar dari informasi yang tidak benar.

Menurut Tim Humas Biro HDI Kemenag RI Moh Khoeron MA, paling tidak MCH mengemban tiga tugas utama. Selain edukasi, juga tugas pelayanan informasi dan konfirmasi. "Itu tugas utamanya, pelayanan informasi. Semua sublayanan di PPIH ini, dapat dijadikan sumber data dan informasi," katanya.

Di sisi lain, Kemenag melibatkan Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan (L3KP) Universitas Indonesia dalam menilai petugas haji. Hal ini dilakukan se-

bagai upaya peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia.

"Sesuai arahan Menteri Agama agar seluruh layanan Kemenag, harus berbasis digital, sehingga semua pelaporan diarahkan secara digital termasuk laporan terkait penyelenggaraan ibadah haji," ungkap Direktur Riset L3K UI, Farhan Muntafa saat menyampaikan materi pada Bimtek PPIH.

Menurutnya, sejak 2019 sudah mulai dilakukan pelaporan petugas kloter (kelompok terbang) melalui aplikasi. Laporan itu mencakup aspek kedatangan maupun keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga sejumlah kasus.

Tahun 2023, PPIH Arab Saudi melakukan uji coba pelaporan kinerja, mulai dari distribusi catering, pelaporan transportasi dan lainnya. Pelaporan kinerja wajib diisi secara harian oleh tiap petugas.

Farhan menerangkan, tahun ini pelaporan kinerja wajib diisi harian oleh tiap petugas (PPIH kloter/ Non Kloter). "Tim kami akan memantau pelaporan tiap petugas PPIH melalui aplikasi berbasis digital yakni elektronik Penilaian Kinerja (e-Penkin)," sebutnya.

Dari pelaporan e-Penkin dapat menjadi rujukan untuk penilaian lembaga dan juga rujukan pimpinan dalam hal penilaian kinerja pegawai.

(Jon)-d

Kesiapan

Sambungan hal 1

dibanding tahun 2023 sebanyak 123 juta jiwa. "Itu terdiri atas moda transportasi yang akan digunakan dari mulai kereta api, paling banyak kereta api (KA), roda empat, bus, sepeda motor, dan transportasi lainnya. Pesawat dan kapal laut," jelasnya.

Untuk berbagai kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik, Polri akan mengantisipasi berbagai kegiatan, baik mudik dan balik. Selain itu, juga mengantisipasi kesiapan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata serta pusat transportasi. (Ant/Has)-f



Prakiraan Cuaca

Jumat, 22 Maret 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌫️ Udara Kabur 🌧️ Hujan Lokal 🌧️ Hujan Pelir

Grafis: Aiko